

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

##### **1. Kebijakan yang diidealkan**

Pada indikator kebijakan yang diidealkan, dalam penelitian disimpulkan bahwa pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang belum ideal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dibutuhkannya evaluasi dan pembaharuan terhadap pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

##### **2. Kelompok Sasaran**

Pada indikator kelompok sasaran, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa respon dari penerima kebijakan dalam menerima kebijakannya terbilang tidak berhasil. Adanya ketidak sesuaian isi kebijakan dengan harapan penerima kebijakan (Penyandang disabilitas dan Pemberi Kerja) sehingga terjadi *complain*/ ketidakpuasaan.

##### **3. Organisasi Pelaksana**

Pada indikator organisasi pelaksana, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengimplementasiannya belum optimal. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang belum memiliki SOP tersendiri dan masih bergantung pada Keputusan Bupati Tangerang Nomor 560/Kep. 111-6-Huk/2022 Tentang Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

##### **4. Faktor Lingkungan**

Pada indikator faktor lingkungan, jika dilihat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik dapat disimpulkan bahwa faktor ini tidak turut mendorong keberhasilan implementasi, dikarenakan lingkungan yang tidak kondusif seperti, diskriminasi hingga saat ini masih didapatkan oleh penyandang disabilitas, banyak perusahaan yang belum merekrut penyandang disabilitas, tingkat pendidikan pada penyandang disabilitas

yang rendah, serta kurangnya tenaga ahli/ pendamping khusus yang dapat berbahasa isyarat.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, antara lain adalah:

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang diharapkan membangun Unit tersendiri khusus ULD Ketenagakerjaan ini yang dapat langsung memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dan pemberi kerja mengenai informasi lowongan pekerjaan ataupun lainnya yang tercantum dalam isi kebijakan.
2. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang diharapkan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kepada penerima kebijakan. Perbaikan komunikasi dapat dilakukan dengan memberikan sanksi tegas dan kedisiplinan yang ketat yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan sekitar.
3. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang diharapkan Perlu peningkatan sistem administrasi dan pendataannya yang mana semua pekerjaan tercatat jelas dan dapat dibuktikan akuntabilitasnya. Administrasi yang baik juga berguna untuk melihat perbandingan dan siklus saat melaksanakan kebijakan serta menjadi bahan evaluasi dalam implementasi kebijakan.